

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Operasional	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)	
A. Pengertian Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	11
B. Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	13
1. Alasan penghapus pidana tidak mampu bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP	13
2. Daya paksa (<i>overmacht</i>) (Pasal 48)	13
3. Pembelaan darurat (<i>noodweer</i>) (pasal 49)	14
4. Menjalankan Peraturan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).....	15

5.	Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)	16
C.	Alasan Penghapus Pidana yang ada Di Luar KUHP	16
D.	Teori Alasan Penghapus Pidana	21
E.	Penelitian terdahulu	24
BAB III	TINJAUAN KHUSUS PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK PERTAHANAN DIRI ATAU DIRI ORANG LAIN MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)	
A.	Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>) dalam Hukum Positif	28
B.	Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	31
C.	Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>)	32
D.	Syarat dan Unsur <i>Noodweer</i>	35
BAB IV	ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) MENJADI DASAR PENGHAPUS PIDANA (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)	
A.	Kasus Posisi	38
B.	Dakwaan Penuntut Umum	41
C.	Pertimbangan Majelis Hakim	48
D.	Putusan Majelis Hakim	60
E.	Analisa Penulis	61
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	